PENGARUH AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN PALI

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Arista
NIM : 22.2013.100

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arista

NIM : 22 2013 100

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian pyang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2017

Penulis

METERAI TEMPEL

94094AEF351103461

6000

ENAM RIBU RUPIAH

(Arista)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
Nama	: Arista
NIM	: 222013100
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....
Pembimbing,

DR. Sa'adah Siddik, S.E., M.Si.,Ak, CA
NIDN:/NBM : 0002095507/972321

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Betri,SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN:/NBM : 0216106902/944806

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto:

- Teruslah berjuang karena tiada hasil yang mengkhianati usaha.
- Jika anda jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali karena anda tidak tahu seberapa dekat anda dengan kesuksesan.
- Setiap aksi memiliki reaksi, setiap perbuatan memiliki konsekuensi dan setiap kebaikan memiliki suatu balasan yang baik.

(Arista)

Ku persembahkan kepada:

- Ayah dan Ibu Tercinta
- Kakak, dan adik-adikku tersayang
- Seseorang yang akan mendampingiku kelak
- Teman-teman seperjuangan
- Almamater

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten PALI ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah kepada rakyat, atas pengelolaan dana publik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang berkualitas mengenai posisi keuangan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pemerintah dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan atau standar yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pemerintah daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) harus meningkatkan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang merupakan sistem akuntansi terbaru yang diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk dapat memberi keyakinan yang memadai bagi tercapai tujuan pemerintah. Adapun penulisan laporan penelitian dibagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab

kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama kepada kedua orangtua (Indano dan Rusniana) beserta kakak dan adik-adikku yang do'a dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu DR. Sa'adah Siddik, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, motivasi serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Abid Djazuli, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pimpinan beserta pegawai pemerintah daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,.....2017

Penulis

Arista

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO ..... **iv**

HALAMAN PRAKATA ..... **v**

HALAMAN DAFTAR ISI ..... **viii**

HALAMAN DAFTAR TABEL ..... **xi**

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

ABSTRAK ..... **xv**

A. **BAB I PENDAHULUAN** **1**

B. Latar Belakang Masalah 1

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 10

E. Manfaat Penelitian 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA **12**

A. Landasan Teori 12

1. Akuntansi Berbasis Akrual 12

2. Sistem Pengendalian Intern 14

3. Kualitas Laporan Keuangan 16

B. Penelitian Sebelumnya 19

C. Kerangka Pemikiran 21

D. Hipotesis 25

BAB III METODE PENELITIAN 26

A. Jenis Penelitian 26

B. Lokasi Penelitian 27

C. Operasional Variabel 27

D. Populasi dan Sampel 28

E. Data yang Diperlukan 30

F. Metode Pengumpulan Data 30

G. Analisis Data dan Teknik Analisis 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42

A. Hasil Penelitian 42

1. Sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten PALI 42

2. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten PALI 44

3. Gambaran Karakteristik Responden 45

4. Gambaran Karakteristik Variabel 47

5. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 48

a. Variabel Akuntansi Berbasis Akrual (X_1) 48

b. Variabel Sistem Pengendalian Intern (X_2) 53

c. Variabel Kualitas Laporan Keuangan 59

6. Pengujian Data Validitas dan Reliabilitas 65

a. Uji Validitas 67

b. Uji Reliabilitas 67

7. Uji Asumsi Klasik 68

a. Uji Normalitas 68

b. Uji Auto Korelasi 69

c. Uji Multikolinearitas 69

d. Uji Heterokedastisitas 70

8. Koefisien Determinasi 71

9. Regresi Linear Berganda 71

10. Uji Hipotesis 73

a. Uji Hipotesis secara Bersama (Uji F) 73

b. Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t) 74

B. Pembahasan 76

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 80

A. Simpulan 80

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN 84

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Opini Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Sumsel 7

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel 27

Tabel III.2 Daftar SKPD Kab. PALI 28

Tabel IV.1 Daftar Nama Pejabat Pemkab PALI 44

Tabel IV.2 Gambaran Umum Responden 45

Tabel IV.3 Jawaban Indikator Pengakuan Pendapatan 48

Tabel IV.4 Jawaban Indikator Pengakuan Beban dan Belanja 49

Tabel IV.5 Jawaban Pencatatan dan Pengukura Aset & Kewajiban 51

Tabel IV.6 Jawaban Indikator Lingkungan Pengendalian 53

Tabel IV.7 Jawaban Indikator Penilaian Risiko 54

Tabel IV.8 Jawaban Indikator Kegiatan Pengendalian 56

Tabel IV.9 Jawaban Indikator Informasi dan Komunikasi 57

Tabel IV.10 Jawaban Indikator Pemantauan 58

Tabel IV.11 Jawaban Indikator Relevan 59

Tabel IV.12 Jawaban Indikator Andal 61

Tabel IV.13 Jawaban Indikator Dapat Dibandingkan 62

Tabel IV.14 Jawaban Indikator Dapat Dipahami 64

Tabel IV.15 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntansi Berbasis Akrual 66

Tabel IV.16 Hasil Uji Validitas Variabel SPI 66

Tabel IV.17 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan 67

Tabel IV.18 Hasil Uji Reliabilitas 67

Tabel IV.19 Hasil Uji Autokorelasi 69

Tabel IV.20 Hasil Uji Multikolinearitas 69

Tabel IV.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi 71

Tabel IV.22 Hasil Uji Regresi Linear Berganda..... 71

Tabel IV.23 Hasil Uji F 73

Tabel IV.24 Hasil Uji t..... 74

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran 22

Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas 68

Gambar IV.2 Hasil Uji Heterokedastisitas 70

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Daftar Nama SKPD Pemerintah Kabupaten PALI 84

Kuesioner Penelitian 85

Hasil Analisis Deskriptif Variabel 89

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 96

Hasil Uji Asumsi Klasik 97

Hasil Uji Koefisien Determinasi 98

Hasil Regresi Linear Berganda 98

Hasil Uji Hipotesis 99

ABSTRAK

Arista/222013100/2017/ Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten PALI/Akuntansi Sektor Publik

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten PALI. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten PALI. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah staf keuangan dari 34 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten PALI sebanyak 102 responden. Teknik pengumpulan data yaitu dengan kuesioner dan dokumentasi. Metode analsisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern signifikan dan positif memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian intern, kualitas laporan keuangan

ABSTRACT

Arista/222013100/2017/ The Influence of Accounting Based Accrual and Internal Control System of Goverment on the Quality of Financial Statement of Kabupaten PALI / Public Sector Accounting

Formulation of the problem in this study was how the influence of accounting based accrual and internal control system of goverment on the quality of financial statement of Kabupaten PALI Objective of the study was for investigating the influence of accounting based accrual and internal control system of goverment on the quality of financial statement of Kabupaten PALI. This study was assosiative. The data used were primary data and secondary data. Population an sample in this study were the financial staff of 34 work units at PALI distric goverment as much as 102 respondents. Data collection techniques were questionnaires and interview. Analysis method of data used in this study were quantitative and qualitative analysis. The result of the study showed that accounting based accrual and internal control system influenced significant and positive on the quality of financial statement.

Keyword: *accounting based accrual, internal control system, the quality of financial statements*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manejerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*). Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah merupakan sesuatu yang penting untuk mendapatkan kepastian mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keungan (APBD/APBN), setiap entitas pelaporan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja.

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah kepada rakyat, atas pengelolaan dana publik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan

dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahmudi (2016: 8) fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Oleh karena itu laporan keuangan yang disajikan diharapkan benar-benar harus berkualitas dengan tingkat karakteristik yang memadai.

Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan PP No.71 Tahun 2010 yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memenuhi kriteria kualitatif seperti yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan laporan keuangan pada sektor publik telah mengalami perubahan, yaitu perubahan sistem akuntansi yang digunakan dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Pemerintah telah menetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) Berbasis Akrual. Pada PP No. 71 tahun 2010 batas waktu penerapan sistem akuntansi akrual secara penuh (*full accrual*) diundur sampai dengan tahun 2014, hal ini berarti pada tahun 2015 pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah harus menerapkan standar akuntansi berbasis akrual secara penuh.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang tediri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah dapat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas.

Menurut Mardiasmo (2009: 154) akuntansi berbasis akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih

akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik

Menurut Halim (2007: 186) meningkatkan laporan keuangan dan kinerja pemerintah, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas terciptanya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dsn efisien, keandalan laporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan (Mahmudi, 2016: 20).

Peningkatan kualitas pengendalian intern yang semakin baik dapat mengurangi keinginan dan kesempatan untuk melakukan penyalagunaan wewenang dan kekuasaan. Sehingga integritas pejabat dan pegawai pemerintahan akan semakin meningkat dan pada akhirnya wibawa pemerintahan dimata masyarakat akan semakin baik.

Unsur-unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya, proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM), di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin

Tahun 2008 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perancangan PP tersebut diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai pelaksanaan dari pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai, bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya PP-SPIP maka setiap menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1), dan sekaligus bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Tuti Herawati (2014) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern tehadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Cianjur berkesimpulan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Cianjur.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Made (2016) yang berjudul pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, berkesimpulan bahwa sumber daya manusia, sistem pengendalian

intern dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Irfania, dkk (2016) yang berjudul Pengaruh Penerapan *Fair* Value dan Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah IV Jawa Barat berkesimpulan bahwa penerapan *fair value* dan basis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Wilayah IV Jawa Barat.

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Penukal Abab Lematang Ilir adalah daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang disahkan pada tanggal 11 Januari 2013. Sebagai kabupaten baru, kabupaten PALI masih banyak kekurangan dalam berbagai aspek seperti sumber daya manusia, teknologi, perekonomian, pembangunan dan lainnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kegiatan pemerintah daerah Kabupaten PALI salah satunya dalam penyusunan laporan keuangan.

Menyusun laporan keuangan dibutuhkan orang-orang yang kompeten, serta memahami setiap standar atau peraturan yang telah ditetapkan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang bekualitas dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dari berbagai pihak. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terdiri dari 18 kabupaten/kota di Wilayah Sumatera Selatan seperti tabel berikut ini:

Tabel I.1
Opini Audit BPK RI atas Laporan Keuangan
Wilayah Sumatera Selatan
Tahun 2013-2015

No	Entitas	OPINI AUDIT BPK		
		2013	2014	2015
1	Provinsi Sumsel	WDP	WTP	WTP
2	Kota Lubuk Linggau	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten OKI	WTP	WTP	WTP
4	Kota Palembang	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Ogan Ilir	WDP	WTP	WDP
6	Kabupaten Banyuasin	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Oku Timur	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Musi Banyuasin	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten OKU Selatan	WDP	WTP	WTP
10	Kabupaten Lahat	WDP	WTP	WTP
11	Kabupaten Empat Lawang	WDP	WDP	WDP
12	Kota Prabumulih	WTP	WTP	WTP
13	Kabupaten OKU	WDP	WDP	WTP
14	Kabupaten Muara Enim	WTP	WTP	WTP
15	Kabupaten Musi Rawas	WDP	WTP	WTP
16	Kota Pagar Alam	WDP	WTP	WTP
17	Kabupaten Musi Rawas Utara	-	TMP	WDP
18	Kabupaten PALI	-	TMP	WDP

Sumber: BPKP Sumsel, 2016

Berdasarkan Tabel I.1 dapat dilihat bahwa opini yang diberikan oleh BPK RI atas Kota/Kabupaten Wilayah Sumatera Selatan belum maksimal, dibuktikan dengan opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian belum didapat oleh semua daerah, dan pada tahun 2015 masih terdapat 4 (empat) daerah yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian, salah satunya yaitu Kabupaten PALI.

Menurut I Gede Kastawa (Berita Pagi, 31 Maret 2016), selaku Kepala BPK Perwakilan Sumatera Selatan, sebagai daerah yang baru dimekarkan BPK memaklumi buruknya laporan keuangan yang diberikan Kabupaten

PALI, karena minimnya sumber daya manusia yang dimiliki dan saat ini laporan keuangan berbasis akrual baru mulai diterapkan di Sumatera Selatan.

Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten PALI sudah cukup baik tergambar dari unsur akuntansi berbasis akrual yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan beban dan belanja telah dilaksanakan sesuai prinsip akuntansi berbasis akrual, akan tetapi pada unsur pencatatan dan pengukuran aset dan kewajiban masih belum memenuhi prinsip akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 13 bidang tanah pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, peralatan dan mesin dicatat secara gabungan tanpa rincian jumlah unit dan dan jenisnya, gedung dan bangunan sebanyak 24 unit aset tetap lainnya dicatat secara gabungan tanpa rincian jumlah unit dan jenisnya serta belum melakukan penyusutan aset tetap lainnya. Laporan keuangan berbasis akrual memiliki jenis yang lebih banyak dibanding manual dari semula empat laporan menjadi tujuh jenis yaitu, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 34.B/LHP/XVIII.PLG/05/2016 tanggal 27 Mei 2016 BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan Kabupaten PALI yang ditemukan BPK yaitu, 1) pengelolaan kas melalui rekening penampungan oleh Bendahara pengeluaran

tidak sesuai ketentuan, hal ini terjadi karena kurangnya kegiatan pengendalian yang dilakukan pimpinan instansi yang bersangkutan. 2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak didukung data yang akurat, 3) pengelolaan dan pentausahaan persedian SKPD belum dilaksanakan secara memadai, hal ini terjadi karena kurangnya pemantauan atas setiap kinerja yang dilakukan pihak instansi. 4) pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten PALI belum tertib, hal ini menunjukan kurang tepeliharanya lingkungan pengendalian intern yaitu komitmen pegawai atas standar atau aturan yang telah ditetapkan. 5) Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal, hal ini terjadi karena penilaian risiko yang dilakukan pimpinan masih belum maksimal. dan 6) pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Bantuan Operasional Sekolah tidak tertib, hal ini menunjukan kurangnya pemantauan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan pihak instansi.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan Nomor 34.C/LHP/XVIII.PLG/05/216 tanggal 27 Mei 2016, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten PALI.

Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah 1) pengelolaan pinjam pakai kendaraan tidak tertib, 2) terdapat kendaraaan dinas yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya belum dilakukan proses tuntutan ganti rugi, 3) pemungutan pelayanan pasar tidak tertib, 4) jasa giro belum disetor ke rekening kas umum daerah dan pemotongan pajak rekening pemerintah tidak tepat, 5) pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas daerah Tahun 2015 tidak sesuai ketentuan, 6) realisasi belanja hibah berlum dipertanggungjawabankan

dan belum dilaporkan, 7) realisasi bantuan keuangan dana desa tidak sesuai ketentuan, 8) kelebihan pembayaran honorium atasa kegiatan rapat koordinasi unsur muspida/forum komunikasi pimpinan daerah, 9) pelaksanaan sembilan kegiatan belanja modal pada enam SKPD kurang volume dan 10) dua kegiatan belanja modal pada Dinas Kesehatan dan Sekretariat DPRD terlambat diselesaikan dan belum dikenakan denda keterlambatan.

Fenomena pelaporan keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai bahkan keliru. Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian sebelumnya penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem

pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

   Mengetahui tingkat kemampuan penulis untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan akuntansi sektor publik pada kenyataan yang nyata dan menyelesaikan studi kasus dilingkungan pemerintahan.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

   Sebagai informasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan penerapan sistem yang berlaku sesuai dengan aturan yang berlaku guna menyelenggarakan transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintahan.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta sebagai acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang, khususnya pada topik yang relatif sama.

DAFTAR PUSTAKA

Daniel dan Yohanes. (2013), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *(Jurnal STIE Semarang)*, (online), Vol. 5 No.3, (http://jurnal.stiesemarang.ac.id/index.php/JSS/article/view/90, diakses 14 November 2016).

Elsye, Rosmery dkk. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah.* Ghalia Indonesia. Bogor.

Erlina, dkk. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual.* Jakarta: Salamba Empat

Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah.* UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Halim & Kusufi (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Hoesada, Jan. Accrual Budgeting Dan Accrual Accounting Pada Pemerintahan NKRI, *Jurnal Akuntansi*/Tahun Xiv No. 1 Januari 2010

Ida dan Made. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Akuntansi,* (online), Vol.16.2, (https://www.unud.ac.id/in/tugas-akhir1215351119.html, diakses 23 Oktober 2016).

Indra, Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Erlangga

Irfania, dkk. (2016).Pengaruh Penerapan Fair Value dan Basis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *(Prosiding Akuntansi)* (online),..ISSN..2460-6561 (http://karyailimiah.unisba.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/3134/pdf, diakses 29 Maret 2016).

Mahmudi. (2016). *Analsisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: CV. Andi.

Misbahudin dan Iqbal. (2013). *Analisis data Penelitian dengan Statistik.* Jakarta: PT. Bumi Aksara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem. Pengendalian Intern Pemerintah (2008) Jakarta: Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Priyatno, Duwi.(2016). *SPSS handbook.* Yogyakarta: MediaKom

Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandug: CV Alfabeta

Tuti Herawati. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Jurnal STAR (Study & Accounting Research).* (online), Vol XI. No 1ISSN 1693-4482 (http://JurnalSTAR(Study&AccountingResearch)/14626/, diakses 23 (Oktober 2016)